

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Percaturan politik di Timur Tengah selalu saja dinamis dan berkembang setiap saat. Timur Tengah sebagai sebuah kawasan yang dikenal kaya raya akan kandungan alamnya, terutama minyak yang merupakan kebutuhan vital bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam perkembangannya, di kawasan Timur Tengah sering terjadi konflik, baik itu konflik antar negara-negara di kawasan Timur Tengah sendiri maupun konflik yang melibatkan negara-negara lain terutama negara-negara Barat yang notabene negara-negara maju yang kapitalis yang selalu mempunyai kepentingan pribadi di balik keterlibatannya di dalam berbagai konflik di kawasan Timur Tengah.

Konflik terakhir yang terjadi di Kawasan Timur Tengah adalah peristiwa invasi AS dengan pasukan koalisinya terhadap Irak. Penyerangan atas Irak yang dilakukan AS, selain untuk mencari senjata pemusnah massal yang dituduhkan oleh AS, juga disebut-sebut sebagai operasi pembebasan rakyat Irak dari rezim Saddam Husein yang otoriter dan dianggap dapat mengancam perkembangan demokrasi di Irak. AS ingin melakukan penegakan demokrasi di Irak yang diharapkan akan membawa pengaruh bagi negara-negara di sekitarnya di Timur-Tengah. Hanya dalam kurun waktu dua bulan, Irak dapat ditaklukkan, akan tetapi setelah diumumkankannya perang telah berakhir oleh Presiden AS George W. Bush,

banyak terjadi konflik di Irak. Tentara koalisi yang dipimpin AS justru mendapat perlawanan dari sebagian rakyat Irak dan gerilyawan Irak. Masa-masa pasca tumbangannya Saddam, rakyat Irak terpecah menjadi dua golongan, yaitu yang pro invasi dan menganggap pasukan koalisi sebagai pembebas dan yang kontra, yang menganggap pasukan koalisi adalah penjajah yang telah menghancurkan Irak.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan tentang sebab-sebab terjadinya ketidakstabilan kondisi di Irak yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara harapan rakyat Irak dan kenyataan yang terjadi dan menimbulkan berbagai perlawanan dari rakyat Irak terhadap pasukan pendudukan yang berada di Irak.

C. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat yang merupakan negara super power, kembali membuat suatu kebijakan luar negeri yang penuh dengan kontroversi, pada pertengahan tahun 2003 lalu, bersama-sama dengan Inggris dan beberapa negara sekutunya, Amerika melancarkan serangan militer ke Irak. Sungguh suatu keputusan yang sangat kontroversial, karena sebelumnya sebagian besar negara-negara di dunia menentang rencana AS untuk menginvasi Irak.

Rencana AS untuk menginvasi Irak mulai santer terdengar paska serangan 11 September 2001. Suatu peristiwa yang sangat memalukan bagi AS. Sebuah

kuat, ternyata dapat dengan mudah kebocoran oleh kelompok teroris, yang berhasil meledakkan menara kembar World Trade Center.

Walaupun AS sudah kalah telak tetapi AS tidak mau kehilangan muka, AS kemudian mengkampanyekan perang melawan teroris dan AS memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam perang global melawan terorisme. Dengan memanfaatkan posisinya di PBB, AS sebagai salah satu negara pemegang hak veto, mencoba memaksa Dewan Keamanan PBB untuk mendukung rencananya untuk menginvasi Irak, karena hal itu dilakukan AS sebagai salah satu wujud dari kampanye perang global melawan terorisme. AS mengatakan bahwa Irak mempunyai hubungan dekat dengan jaringan terorisme Al Qaeda, dan Irak memiliki senjata pemusnah Massal yang dapat mengancam perdamaian dunia. Meskipun Dewan Keamanan PBB tidak merestui AS untuk menyerang Irak, tetapi AS tetap saja menyerang Irak.

Keputusan AS yang kelihatan sangat gegabah dan terlihat terburu-buru untuk menyerang Irak memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pengamat. Dilihat dari infrastruktur militernya, Irak sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan AS, apalagi setelah mengalami kekalahan yang parah pada saat perang dengan Kuwait pada tahun 90an, ditambah lagi akibat dari sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh PBB yang membuat Irak hanya bisa menjual minyaknya secara terbatas dan juga adanya zona larangan terbang dan dikucilkan dari dunia internasional, yang sanksi-sanksi itu atas desakan AS juga. Sanksi-sanksi itu diberikan kepada Irak karena Irak secara sepihak menganeksasi Kuwait dan mengklaim bahwa Kuwait adalah bagian dari wilayah Irak sebagai provinsi ke 19.

Sebagai pihak yang kalah perang pada tahun 90an, Irak harus mematuhi sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh PBB itu. Peraturan itu menunjukkan bahwa Irak dilarang mencari uang untuk membeli sesuatu dan hal itu membuat Irak tidak bisa mengembangkan perekonomiannya dan tidak dapat membangun infrastruktur negaranya yang hancur akibat dibom AS pada perang teluk II dengan Kuwait.

Keadaan negara Irak yang parah dan ditambah lagi infrastruktur militer yang hanya berupa sisa-sisa dari Perang Teluk dengan Kuwait, kekuatan persenjataan Irak pada saat ini sangat jauh dibandingkan sebelum tahun 90-an. Dengan kondisi seperti itu, Irak diibaratkan sebagai sebuah negara yang sakit-sakitan yang tidak memiliki senjata apapun yang tinggal menunggu ajal karena akan diserang oleh AS, sebuah negara Super Power yang memiliki persenjataan yang lengkap dan armada tempur terlatih yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan yang tersebar di penjuru dunia. Diibaratkan AS adalah seekor macan besar yang memiliki taring yang sangat tajam yang siap untuk mencengkeram Irak yang diibaratkan sebagai seekor kucing sakit-sakitan yang sudah tidak memiliki gigi.

Pada pertengahan tahun 2003, AS melancarkan serangan militer ke Irak, dan hanya dalam kurun waktu yang singkat, AS berhasil memporak-porandakan Irak dan berhasil menumbangkan rezim Saddam Husein yang ditandai dengan peristiwa perobohan patung Saddam Husein yang berada di kota Baghdad, yang disaksikan oleh rakyat Irak yang bersorak-sorai atas robohnya patung Saddam Husein yang juga merupakan lambang kediktatoran rezim Saddam. dengan

sebuah negara yang demokratis versi AS yang akan menjadi pemerintahan boneka yang akan dapat meloloskan setiap kebijakan yang dirumuskan AS atas negara itu. Kondisi Irak setelah berakhirnya perang ternyata tidak seperti yang diperkirakan AS sebelumnya. Pasukan koalisi harus berada lebih lama di Irak untuk menjaga keamanan pasca tumbanganya Saddam.

Pasukan Koalisi juga harus terus melanjutkan upayanya untuk mencari Saddam Husein yang menghilang, sesaat sebelum tentara koalisi memasuki Bagdhad. Dan banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Irak membuat pasukan koalisi harus bekerja ekstra untuk menjaga keamanan di Irak. Pemerintah Amerika memang telah mengumumkan bahwa perang telah berakhir, namun bagi para pendukung Saddam Husein dan rakyat Irak yang mencintai kemerdekaan, pertempuran justru baru saja dimulai¹, hal itu ditunjukkan dengan adanya serangan-serangan intensif yang dilancarkan kepada tentara pendudukan di Irak.

Dilihat dari faktor demografi di Irak, akan sulit bagi AS untuk membuat suatu sistem pemerintahan yang demokratis di Irak, hal itu karena Irak merupakan negara yang terdiri dari banyak suku sehingga akan sangat rentan terhadap ancaman terjadinya perebutan kekuasaan melalui kudeta yang merupakan tindakan yang sangat tidak demokratis. Hal ini dikarenakan adanya keinginan tiap suku untuk menduduki jabatan sehingga dapat mengakomodasikan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan kelompoknya di atas kelompok lain. Dalam soal pemerintahan makin banyak aspirasi muncul dari berbagai kelompok yang bisa

yang dimunculkan oleh kelompok pro-AS, kelompok-kelompok oposisi yang semula berdampingan dengan AS ketika melengserkan Saddam Hussein tapi punya aspirasi lain, kelompok yang menghendaki pemerintahan beraliran Syiah seperti di Iran dan yang menentang gagasan tersebut. Orang-orang Syiah menyerukan dibentuknya pemerintahan Islam di Irak yang dapat menjamin kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Irak.

Seruan ini berbanding terbalik dengan keinginan Bush, yang menghendaki sebuah bangunan negara pasca-Saddam, dengan menyodorkan nilai-nilai demokrasi rakyat versi Amerika. Satu bangunan demokrasi yang berusaha meminggirkan paham yang selama ini dianut oleh pemerintahan Irak, yaitu paham sosialisme yang disesuaikan dengan nilai-nilai Arab yang dicetuskan oleh pendiri Partai Baath, Michel Aflaq. Selama masa pemerintahannya, Saddam selalu menanamkan paham Partai Baathnya kepada masyarakat Irak. selain itu Saddam juga menggunakan sentimen keagamaan yang berkembang di masyarakat, yaitu Islam yang merupakan agama mayoritas di Irak. Dengan hadirnya sistem demokrasi versi Amerika, otomatis pola bangunan demokrasi rakyat versi Amerika, setidaknya akan meminimalisasi nilai-nilai Islam dan peran-peran lembaga Islam, dengan menggantikan jubah demokrasi yang berbau sekular. Keinginan Amerika ini ditanggapi dingin oleh kaum Syiah yang merupakan komunitas terbesar di Irak, mereka tidak mau menerima tawaran sistem kenegaraan Barat atau demokrasi rakyat yang dipaksakan oleh Amerika. Kaum Syiah akan menjadikan momentum kejatuhan Saddam, untuk merayakan kembali

nilai-nilai Islam dalam konstelasi kehidupan rakyat Irak, yang selama ini dikerangkeng orde Saddam.²

Selain itu ada kaum Sunni, yang walaupun tergolong komunitas yang minoritas, tetapi mereka telah memegang kekuasaan di Irak selama puluhan tahun, yang merupakan peran Saddam Husein dengan Partai Bath nya. Secara psikologis kaum Sunni tentu tidak begitu saja rela untuk kehilangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Irak. Pasca tumbangnya Rezim Saddam, kaum Sunni sendiri terpecah dalam beberapa sikap, ada yang memandang mereka perlu untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan era Saddam tetapi tanpa Saddam dan ada juga yang tetap loyalis pada Saddam.

D. Rumusan Masalah

Mengapa kondisi politik di Irak pasca invasi Amerika tahun 2003 tidak stabil padahal Amerika menjanjikan stabilitas politik dan keamanan yang berlandaskan demokrasi ?

E. Kerangka Dasar Teori

Menurut Jack C Plano & Robert E. Riggs, teori merupakan suatu gagasan atau kerangka berfikir yang mengandung penjelasan, ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan empiris (termasuk ilmu politik empiris), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat preposisi yang

memastikan adanya hubungan antara variable-variabel dengan maksud menjelaskan atau meramalkan antar kedua-duanya.³

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi konflik antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Menurut definisi Webster, konflik didefinisikan sebagai suatu bentuk perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak,⁴ arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain. Menurut para ahli ilmu sosial, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik :

1. Deprivasi Relatif

Kekerasan politik menurut *Ted Robert Gurr*, menunjuk pada semua serangan kolektif pada sebuah rezim politik, termasuk sebagai kemungkinan sasaran persaingan kelompok-kelompok politik. Pengertian dari definisi tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Berdasarkan definisi itu, kekerasan politik tidak dilakukan oleh penguasa negara, tetapi oleh mereka yang menentangnya.⁵

Deprivasi Relatif didefinisikan sebagai persepsi aktor tentang kesenjangan antara *ekspektasi nilai* dan *kapabilitas nilai*. *Ekspektasi nilai* adalah barang dan kondisi kehidupan yang oleh manusia diyakini sebagai haknya. *Kapabilitas nilai*

³ Plano, Jack C, Robert E. Riggs, Helenan S Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1994, hal. 266

⁴ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 9

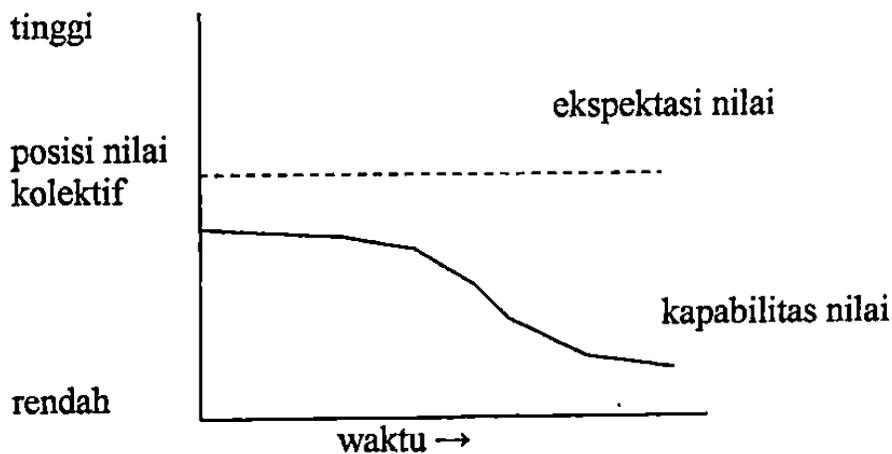
adalah barang dan kondisi yang dianggap bisa diperoleh dan dipelihara.⁶ *Ekspektasi nilai* mengacu pada kondisi sekarang dan masa depan. Manusia biasanya berharap untuk mempertahankan apa yang mereka miliki, mereka juga umumnya mempunyai sekelompok ekspektasi dan tuntutan tentang apa yang harus mereka miliki dimasa depan yang biasanya lebih besar atau lebih banyak dari yang mereka miliki sekarang. *Kapabilitas nilai* ditunjukkan oleh hasil aktual yang dapat diperoleh manusia atau yang diberikan lingkungannya yang disebut posisi nilai.

Apabila suatu kondisi menunjukkan rata-rata posisi nilai yang dapat dicapai atau posisi potensial mengalami penurunan drastis maka hal itu disebut *Deprivasi Dekremental*.⁷ Dalam situasi seperti itu, orang menjadi marah kehilangan apa yang pernah mereka miliki atau apa yang menurut mereka bisa dimiliki. Posisi nilai keseluruhan masyarakat bisa turun karena berkurangnya produksi barang materiil, berkurangnya kapasitas elite politik dalam mengatur pemerintahan atau menyelesaikan krisis, masuknya pemerintahan asing, atau hilangnya keteguhan dalam struktur kepercayaan masyarakat dan munculnya norma-norma tindakan baru.

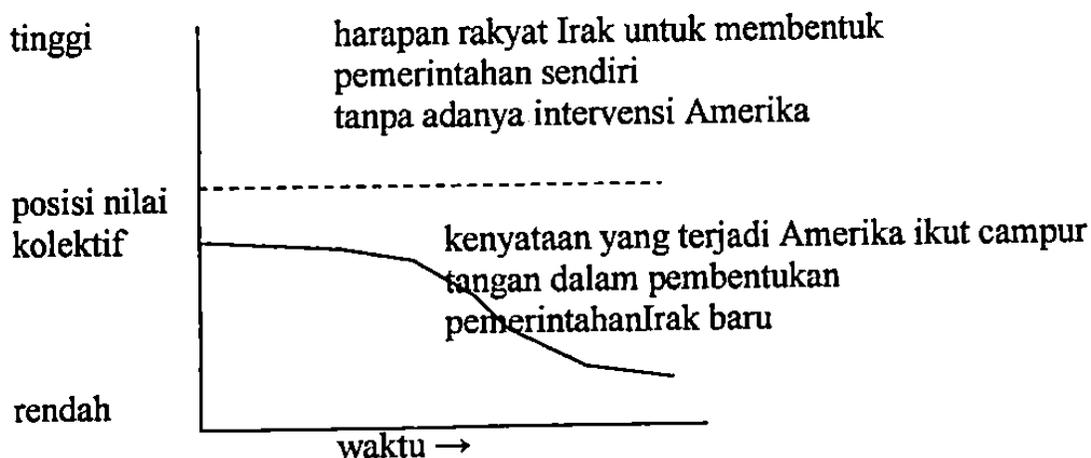
Konflik dapat timbul apabila ada kesenjangan antara harapan dengan hasil yang dicapai. Konflik dan kekerasan paling sering terjadi pada saat berbagai kondisi yang ada mulai membaik. Perbaikan awal setelah sekian lama tertekan, menumbuhkan suatu revolusi peningkatan harapan. Harapan tumbuh lebih cepat daripada kenyataan, sehingga akan tercipta suatu kesenjangan aspirasi.

Pemberontakan politik dan pembangkangan lainnya terjadi apabila rakyat merasa apa yang mereka terima kurang dari semestinya. Untuk mencapai perolehan yang lebih besar atau menebus kekecewaannya, kelompok yang bersangkutan mengambil jalan agresi dan kekerasan politik.⁸ Jika seseorang memiliki beberapa alternative untuk memenuhi harapan mereka, kemungkinan seseorang dapat menggagalkan munculnya ketidakpuasan, dan sebaliknya jika seseorang hanya mempunyai sedikit cara alternative, maka seseorang akan mengalami kemarahan karena keputusan

Gambar Deprivasi Dekremental⁹



Aplikasi dalam kasus Irak



Rakyat Irak mempunyai ekspektasi nilai yang tinggi, rakyat Irak menginginkan pembentukan pemerintahan sendiri tanpa adanya intervensi asing, hal itu diyakini hak rakyat Irak dan berhak dimiliki untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing. Kapabilitas nilai atau kondisi yang terjadi adalah Amerika ikut campur dalam masalah pembentukan pemerintahan Irak baru, dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi nilai rakyat Irak mengalami penurunan drastis, rakyat Irak merasa kehilangan apa yang menurut mereka bisa dimiliki yaitu kemerdekaan dan kebebasan menentukan nasib negaranya sendiri, situasi seperti itu mengakibatkan rakyat Irak mengalami kekecewaan dan kemarahan.

Kekecewaan mereka itu dimanifestasikan dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang bertujuan untuk mengingatkan tentang pentingnya peran kaum Sunni di Irak. Secara umum kaum Sunni di Irak tidak siap secara politik untuk menghadapi era pasca Saddam, karena faktor psikologis akibat dari lamanya mereka mendominasi pemerintahan Irak dan kini tiba-tiba kekuasaan itu hilang secara otomatis seiring robohnya kekuasaan Saddam akibat invasi AS.

Kekecewaan kaum Sunni memuncak ketika terjadi pembentukan Dewan Pemerintahan Transisi Irak, kaum Sunni merasa mendapat perlakuan yang kurang adil dalam pembagian etnis dan mazhab agama dalam komposisi anggota Dewan Pemerintahan Transisi. Mereka merasa kecewa berat tidak hanya karena jumlah wakil mereka yang kecil, tetapi juga wakil mereka di Dewan itu dinilai tidak memiliki basis massa dan tidak memiliki popularitas di kalangan kaum Sunni.¹⁰

Kekecewaan dan keputusasaan kaum Sunni diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi perlawanan dan aksi kekerasan, karena mereka merasa sebagai pihak yang paling dirugikan pasca jatuhnya Saddam. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kaum Sunni itu bisa menghambat stabilitas keamanan di Irak pasca Saddam.

Aksi perlawanan tidak hanya dilakukan oleh kaum Sunni saja, tetapi juga dilakukan oleh kaum Syiah di Irak, kaum Syiah di Irak merupakan oposisi dalam sistem pemerintahan Irak sejak tampilnya Sadaam Husein menjadi Presiden Irak pada tahun 1979. Selama masa pemerintahan Saddam kaum Syiah hidup di bawah tekanan. Mereka dilarang untuk menyelenggarakan peringatan-peringatan keagamaan. Kondisi kaum Syiah yang merupakan mayoritas di Irak tidak sejalan dengan komposisi pemerintah di Irak era Saddam. Pada masa rezim Saddam panggung politik di Irak banyak didominasi oleh orang-orang Sunni, sedangkan orang-orang Syiah tidak mendapatkan kebebasan politik yang layak. Hal itulah yang membuat kaum Syiah memandang perlu untuk melakukan manuver-manuver untuk bisa ikut terlibat dalam sistem pemerintahan Irak pasca invasi.

Kaum Syiah di Irak menuntut diserahkannya kedaulatan negara kepada rakyat Irak, supaya rakyat Irak bisa memilih pemimpin Irak yang baru secara langsung. Hal itu dilakukan oleh kaum Syiah karena kekhawatiran mereka akan kemungkinan didominasinya struktur pemerintah oleh suku lain. Pemimpin karismatik Syiah *Ayatollah Ali Muhammad Al- Sistani*, menyatakan bahwa pemilihan di Irak harus dilakukan secara langsung atas pilihan rakyat. Ia juga menyatakan sikap menentang mekanisme peralihan kekuasaan dari AS pada

2. Intervensi Asing

Pengertian Intervensi mengarah pada hal pemaksaan seperti yang dikemukakan oleh Jack C Plano & Roy Olton adalah campur tangan secara paksa yang dilakukan oleh satu atau beberapa negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan maksud untuk mempengaruhi kebijaksanaan politik dalam atau luar negeri dari negara yang diintervensi.¹¹

Suatu negara dapat melakukan intervensi terhadap negara lain dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Diminta atau diundang oleh penguasa negara tersebut karena merasa terancam kedudukannya.
2. Diundang oleh partai oposisi atau pemberontak untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
3. Sebagai tamu tak diundang.

Suatu negara yang mempunyai potensi yang besar akan terjadinya konflik kesukuan, keagamaan, ekonomi, atau ideologi dalam masyarakat, semakin besar kemungkinan bahwa suatu pemerintahan luar akan melakukan intervensi untuk melayani kepentingan-kepentingannya sendiri. Menurut K. J. Holsti, intervensi dikategorikan menjadi lima bentuk sebagai berikut¹²:

1. *Tindakan politik Rahasia*

Tindakan untuk mempengaruhi kondisi politik negara lain dengan melalui cara-cara yang tersembunyi, yaitu melalui propaganda tersembunyi.

¹¹ Jack C Plano & Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston Inc. 1969, hal. 62

2. *Demonstrasi kekuatan*

Memperlihatkan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan, baik untuk membantu maupun menghalangi pemberontakan dalam negeri sebuah negara asing.

3. *Subversi*

Mendukung, mengatur dan mengarahkan suatu potensi pemberontakan di dalam negeri sebuah negara asing.

4. *Perang Gerilya*

5. *Intervensi Militer*

Yaitu dengan pengiriman sejumlah besar pasukan, baik untuk memantapkan suatu rezim terhadap pemberontak atau membantu para pemberontak menggulingkan suatu perangkat penguasa yang telah mapan.

Masih menurut K. J. Holsty, tujuan suatu negara untuk melakukan intervensi dibagi menjadi enam macam¹³ :

1. *Konflik wilayah terbatas*, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada kepemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain.
2. *Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah*. Tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat ;

mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang melakukan intervensi.

3. *Konflik kehormatan nasional*, di mana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga. Suatu negara mungkin meningkatkan insiden tertentu yang relative kecil menjadi suatu krisis penuh.
4. *Imperialisme Regional*, di mana suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan, dan perdagangan.
5. *Konflik pembebasan*, atau perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk “membebaskan” rakyat negara lain, biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologis.
6. *Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah.*

Dilihat dari sebab atau tujuannya, Invasi yang dilakukan AS terhadap Irak merupakan konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah. Upaya untuk menjatuhkan suatu rezim dan mendirikan suatu pemerintahan yang lebih menguntungkan pihak yang melakukan intervensi. Pemerintah Amerika berusaha untuk menumbangkan rezim Saddam Husein yang bersifat otoritarian dan mengantikannya dengan suatu pemerintahan yang demokratis versi AS yang tentunya akan membawa keuntungan bagi AS dalam memperlancar berbagai

F. Hipotesa

Berpijak dari rumusan masalah dan kerangka dasar teori, ketidak stabilan politik di Irak pasca invasi Amerika disebabkan karena adanya kesenjangan yang amat lebar antara janji kestabilan politik dan kenyataan yang terjadi, bentuk kekecewan itu antara lain terwujud dalam:

1. Adanya semangat nasionalisme yang diwujudkan dengan keinginan rakyat Irak untuk membentuk pemerintahan sendiri tanpa intervensi Amerika
2. Hadirnya pasukan koalisi yang tidak disukai oleh rakyat Irak

G. Metode Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur atau buku-buku ilmiah, artikel-artikel majalah atau koran, internet, naskah-naskah dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Sumber data penelitian ini data data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber sekunder adalah bahan yang diperoleh dari orang lain dalam bentuk turunan, salinan atau bukan tangan pertama. Dan sumber-sumber sekunder lainnya yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

H. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini hanya terbatas pada saat pasca invasi tentara pendudukan, yaitu pasca dinyatakannya perang telah berakhir oleh Bush pada bulan Mei 2003 sampai dengan sebelum pemilu di Irak yang akan

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Pertama, bab pertama ini merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

Kedua, bab kedua ini akan dibahas mengenai politik dan pemerintahan Irak sebelum terjadinya invasi 2003, yang meliputi : sejarah dan profil negara Irak, negara Irak di bawah Saddam Husein, kelompok oposisi di Irak dan perang besar yang pernah dialami era Saddam Husein.

Ketiga, bab ketiga ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang dan proses terjadinya invasi serta alasan AS untuk menginvasi Irak yang meliputi senjata pemusnah massal, demokratisasi dan janji-janji Amerika terhadap Irak, sikap negara tetangga Irak, dan kondisi Irak saat terjadinya invasi 2003.

Keempat, bab keempat ini membahas tentang sebab-sebab ketidakstabilan kondisi politik di Irak dan berbagai tuntutan politik rakyat Irak, baik itu dari kaum Sunni maupun kaum Syiah, dan kebijakan pemerintah AS di Irak pasca invasi. Disamping itu dalam bab ini akan membahas kehadiran pasukan koalisi yang tidak disukai oleh rakyat Irak yang memunculkan berbagai perlawanan bersenjata.

Kelima, bab kelima merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dari